

**ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR
NEGERI DI PULAU GILI IYANG KABUPATEN SUMENEP**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**



Disusun Oleh:

**NURIS SYARIFATUL IMAMIYAH
NIM: 201620240211030**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
JANUARI 2019**

ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR
NEGERI DI PULAU GILI IYANG KABUPATEN SUMENEP

NURIS SYARIFATUL IMAMIYAH
201620240211030

Telah disetujui
Pada hari/tanggal, Sabtu/19 Januari 2019

Pembimbing Utama,


Dr. Ainur Rofiq

Pembimbing Pendamping,


Dr. Mohammad Syaifuddin


Ketua Program Studi
Magister Kebijakan dan Pengembangan
Pendidikan,
Akhsanul U'lam, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Kebijakan dan Pengembangan
Pendidikan,


Dr. Agus Tinus

TESIS

NURIS SYARIFATUL IMAMIYAH
201620240211030

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada hari/tanggal, Sabtu/**19 Januari 2019**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji : Dr. Ainur Rofieq

Sekretaris / Penguji : Dr. Mohammad Syaifuddin

Penguji : Dr. Muhammad Syahri

Penguji : Dr. Sri Hartiningsih

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **NURIS SYARIFATUL IMAMIYAH**

NIM : **201620240211030**

Program Studi : **Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. TESIS dengan judul : **ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI PULAU GILI IYANG KABUPATEN SUMENEP** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Januari 2019

Yang menyatakan,



NURIS SYARIFATUL IMAMIYAH

ABSTRAK

Imamiyah, Nuris Syarifatul. 2019. Analisis Problematika Pembelajaran Sekolah Dasar Negeri di Pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep. **Pembimbing (I) Dr. Ainur Rofieq (II) Dr. Mohammad Syaifuddin.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembelajaran sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep dan strategi yang diterapkan untuk mengatasinya. Problematika pembelajaran yang diteliti didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data wawancara diperoleh dari kepala sekolah dan guru-guru di sekolah dasar negeri di Desa Bancamara pulau Gili Iyang sebagai informan. Lembar observasi didasarkan pada pengamatan langsung peneliti terkait proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Data untuk studi dokumen diperoleh dari data jumlah guru, jumlah siswa, presensi kehadiran guru dan siswa, silabus dan juga RPP. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles and Huberman. Kemudian untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi. Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penyusunan dan penggunaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam proses pembelajaran yang memuat tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Problematika pembelajaran, secara umum, yang terjadi di pulau Gili Iyang adalah distribusi guru yang belum merata; ketimpangan jumlah guru honorer dan pegawai negeri; faktor transportasi; jumlah sekolah; dan tunjangan kesejahteraan. Strategi yang diimplementasikan guna mengatasinya adalah: menjaga baik komunikasi antar guru; merekrut *fresh graduate* yang merupakan penduduk asli pulau Gili Iyang; mengupayakan pendekatan secara kekeluargaan untuk membuat nyaman para guru honorer sehingga memperkecil niat untuk berhenti mengajar; membuat piket masuk secara bergantian guna mengupayakan tetap ada guru yang hadir ke sekolah; memberlakukan hari kerja sebanyak 50 persen plus 1 hari dari jumlah total hari efektif dalam satu bulan; memberlakukan kebijakan internal sekolah sehubungan dengan alokasi dana BOS untuk kesejahteraan guru honorer; dan membiasakan para guru berstatus honorer dan pegawai negeri untuk siap mengajar lebih dari satu kelas.

Kata Kunci: Problematika Pembelajaran, Sekolah Dasar Negeri, Pulau.

ABSTRACT

Imamiyah, Nuris Syarifatul. An Analysis on State Elementary Schools Learning Problems in Gili Iyang Island Sumenep. **Advisors (I) Dr. Ainur Rofieq (II) Dr. Mohammad Syaifuddin.**

This study was aimed to analyze the state elementary schools learning problems in Gili Iyang island Sumenep and the strategies applied to overcome those problems. The learning problems being studied was based on the Indonesian Minister of Education Regulation number 22 of 2016 about the Standardized Process on Elementary and Middle School Education. This study was qualitative study using descriptive approach. The data of study was obtained through interview, researcher observation, and documents study. The interview data was collected from state elementary schools' headmasters and teachers in Bancamara, Gili Iyang island. The observation sheets were based on researcher' direct participation during classroom activities held by teachers. While the data of document study was taken from teachers' and students' number and attendance list, syllabus, and also lesson plan. Then the data was analyzed using the interactive model, a concept from Miles and Huberman. This study used sources triangulation for its validity checking. While the results showed that teaching plan, which consisted of planning, implementing, and evaluating process, was arranged and applied. In general, the learning problems happened in Gili Iyang island were the teachers' work-placement; imbalance number of teachers; public transportation issues; number of schools; and also, the teachers' salary issues. The strategies applied to overcome those problems were maintaining good relationship and way of communicating among teachers; recruiting fresh graduates; applying a family-friendly approach to comfort those honorary teachers; making a regular schedule to keep teachers attending school; applying a working day of 50 percent plus 1 day from total number of effective days in a month; applying an internal policy in school in terms of allocating the school fund for honorary teachers' welfare; and having the teachers familiar teaching more than one class at the same day.

Keywords: Learning Problems, State Elementary Schools, Island.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan ini untuk menyelesaikan Tesis dengan judul **‘ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI PULAU GILI IYANG KABUPATEN SUMENEP’** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang.

Selama penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa semua tidak akan selesai dengan baik tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

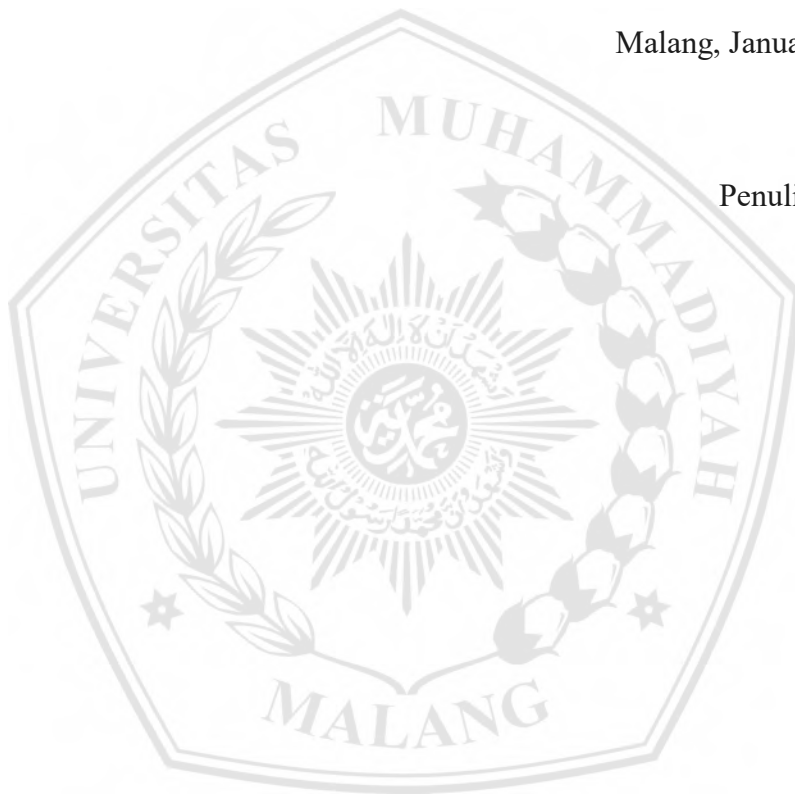
1. Dr. Fauzan selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan tugas kepada dosen untuk mengantarkan dan membimbing dalam menyelesaikan tesis.
3. Dr. Agus Tinus, selaku Ketua Program Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan yang telah memberikan bekal dalam penulisan tesis dan selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi.
4. Dr. Ainur Rofieq, selaku pembimbing utama yang meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing dalam menyelesaikan tesis.
5. Dr. Mohammad Syaifuddin, selaku pembimbing pendamping yang selalu membantu dan membimbing dalam menyempurnakan tesis ini.
6. Kepala sekolah SDN Bancamara 1, SDN Bancamara 2, dan SDN Bancamara 3 beserta para guru, yang telah bersedia menjadi informan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Imam Mahmud dan Ibu Kusmiati, yang selalu memberikan doa, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang.
8. Suami tercinta Moh. Sulton dan anak tersayang Siti Aisyah atas segala perhatian, dukungan, dan motivasi.
9. Teman-teman seperjuangan MKPP 2016, atas pengalaman dan kesempatan bertukar pikiran selama ini.

Semoga keikhlasan dari orang-orang yang penulis sebut diatas dalam membimbing dan memotivasi dapat dicatat sebagai amal sholeh dan akan selalu memperoleh yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam tesis ini. Dari kekurangan tersebut, semoga dapat memberi inspirasi kepada pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga akan lebih sempurna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, Januari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan Penguji	iii
Surat Pernyataan	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
1. Pendahuluan.....	1
2.Kajian Pustaka	4
2.1. Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.	4
2.2. Problematika Pembelajaran.	7
2.3. Problematika Pendidikan di Daerah Kepulauan.....	10
2.4. Penelitian Terdahulu.	12
3. Metode Penelitian	12
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
3.2. Data dan Sumber Data	13
3.3. Teknik Pengumpulan Data.	14
3.4. Teknik Analisis Data.....	14
3.5. Uji Keabsahan Data.....	14
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan... ..	14
4.1. Problematika Pembelajaran Sekolah Dasar Negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep	14
4.2. Strategi Guna Mengatasi Problematika Pembelajaran Sekolah Dasar Negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep	33
5. Simpulan dan Saran.. ..	37
5.1. Simpulan	37
5.2. Saran.....	38
6. Rujukan	38

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, luas wilayah laut Indonesia totalnya adalah 5,9 juta km², yang terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif. Luas tersebut belum termasuk landas kontinen (Lasabuda, 2013). Kepulauan adalah sebutan untuk kumpulan pulau-pulau atau gugusan beberapa buah pulau. Negara kepulauan adalah negara yang wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan. Terdapat 45 negara yang digolongkan sebagai negara kepulauan dari 193 negara berdaulat yang telah diakui oleh Internasional dan menjadi anggota PBB.

Kondisi negara yang pulaunya tersebar luas, besar kemungkinan akan menghadapi masalah dalam hal distribusi. Terkait dengan bidang pendidikan, distribusi guru yang belum merata merupakan persoalan penting yang ada di Indonesia. Distribusi guru SD, misalnya. Jumlah guru di daerah-daerah dengan kondisi kecil, sulit, dan terpencil berbeda dengan guru di kota. Padahal, jumlah guru SD tidaklah sedikit. Berdasar Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Kemenristekdikti pada tahun 2015, dari 37 Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) negeri dan 378 LPTK swasta, tercatat sebanyak 91.247 lulusan yang dihasilkan. Perbedaan tersebut berimbas pada proses belajar mengajar. Lebih jauh lagi, problematika yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Rata-rata hasil belajar siswa SD di kota besar umumnya jauh lebih tinggi daripada siswa di daerah terpencil (Djalil, 1998).

Kehadiran seorang guru di kelas sangat penting artinya, apalagi di tingkat sekolah dasar. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen (UU No 14 Tahun 2005, 2005) disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, guru memegang peranan sebagai sutradara sekaligus aktor dan merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di kelas (Sutarmanto, 2015).

Seorang guru harus mengacu pada standar ketentuan yang telah ditetapkan ketika menjalankan tugasnya. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Tahapan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar Proses yang dimaksud, meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Kabupaten Sumenep merupakan satu dari empat kabupaten yang ada di pulau Madura. Dilansir dari laman pemerintah Kabupaten Sumenep, terdapat 126 pulau di kabupaten yang terletak di ujung timur Madura tersebut. Satu diantaranya adalah pulau Gili Iyang. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam kecamatan Dungkek. Ada dua desa yang terdapat di pulau ini, yakni desa Banraas dan desa Bancamara. Terdapat lima sekolah dasar negeri di pulau tersebut. Dua sekolah berlokasi di desa Banraas dan sisanya berada di desa Bancamara. Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada tahun 2012, akses menuju pulau Gili Iyang bisa ditempuh selama kurang lebih satu jam perjalanan darat dari pusat kota Sumenep dengan jarak 28 km. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan transportasi air selama 50 menit. Lama tempuh selama menggunakan transportasi air bergantung pada kondisi cuaca yang terjadi.

Guru berstatus pegawai negeri yang ditempatkan di pulau Gili Iyang hampir sebagian besar berasal dari luar pulau. Selama hari kerja, para guru bermukim di rumah sewa dan tinggal berjauhan dari keluarga. Karenanya, para guru akan membutuhkan lebih dari sehari untuk bisa bertemu dengan keluarga. Tidak hanya itu, jam operasional transportasi air yang ada juga terbilang belum mendukung.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada tahun 2012, perahu motor sebagai satu-satunya sarana menuju ke pulau Gili Iyang, beroperasi sebanyak dua kali. Keberangkatan pertama pada sekitar jam 06.00 WIB dari Gili Iyang, dan bertolak dari pelabuhan di kecamatan Dungkek sekitar jam 12.00 WIB. Sedangkan perahu motor pada jam operasional kedua berangkat pada jam 11.00 WIB, dan bertolak pada jam 14.00 WIB dari pelabuhan yang sama. Di luar jam tersebut, masyarakat dikenai biaya yang lebih tinggi untuk bisa menumpang perahu motor. Kondisi ini tidak memungkinkan bagi para guru di pulau Gili Iyang untuk bisa berangkat dan bertolak pada hari yang sama untuk mengajar dan kembali ke rumah.

Seorang guru yang ditugaskan di sebuah pulau akan dihadapkan pada dua pilihan, memenuhi jam kerja sebagaimana mestinya dengan konsekuensi tinggal berjauhan dan jarang bertemu keluarga, atau bisa bertemu keluarga setiap minggunya tetapi meninggalkan siswanya. Bila pilihan kedua yang menjadi prioritas seorang guru, konsekuensinya pemenuhan jam mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Persentase ketidakhadiran guru akan menimbulkan problematika pembelajaran. Salah satunya, jumlah kehadiran guru dalam satu sekolah yang tidak sebanding dengan jumlah kelas yang harus menerima pelajaran, akan membuat seorang guru harus mengajar lebih dari satu kelas dalam waktu yang bersamaan. Bila hal tersebut terjadi, maka tahapan proses pembelajaran seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran juga akan menimbulkan problematika tersendiri. Problematika pembelajaran pada umumnya bersifat kompleks, sedangkan kompleksitas tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor utama, yakni: pengaruh budaya, pengaruh sejarah, hambatan praktis, karakter guru sebagai pembelajar, karakter siswa, dan proses belajar (Budyartati, 2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana problematika pembelajaran yang terjadi pada sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep?; (2) Apa strategi yang diterapkan

untuk mengatasi problematika pembelajaran pada sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep?

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

Standar Proses merupakan satu dari delapan komponen Standar Nasional Pendidikan. Tujuh komponen lainnya adalah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan Pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

2.1.1 Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan juga sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan.

2.1.1.1 Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan mata pelajaran. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus paling sedikitnya memuat: (a) Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan); (b) Identitas sekolah yang meliputi nama satuan pendidikan dan kelas; (c) Kompetensi inti, yang memuat gambaran secara kategorial mengenai kompetensi

dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan juga mata pelajaran; (d) Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan muatan atau mata pelajaran; (e) Tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A); (f) Materi pokok, mencantumkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi; (g) Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang hendak dicapai; (h) Penilaian, adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik; (i) Alokasi waktu, disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan (j) Sumber belajar, bisa berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

2.1.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri atas: (a) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; (b) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema; (c) Kelas/semester; (d) Materi pokok; (e) Alokasi waktu; (f) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (g) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; (h) Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis

dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi; (i) Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai; (j) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran; (k) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; (l) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan (m) Penilaian hasil pembelajaran.

2.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.

2.1.2.1 Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

2.1.2.2 Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran.

2.1.2.3 Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: (a) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; (b) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; (c) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk

pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok, dan (d) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

2.1.3 Penilaian Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan pembelajaran, pengayaan, atau pelayanan konseling. Tidak hanya itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan.

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Melalui evaluasi, siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan guru terdorong untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta mendorong sekolah untuk lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas manajemen sekolah (Widoyoko Tayibnapi, 2000).

2.2 Problematika Pembelajaran

Pembelajaran pada dasarnya merupakan usaha mengubah seseorang menjadi pribadi baru dengan kualitas tertentu. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan aktivitas utama dalam pendidikan. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku hasil belajar bersifat kontinyu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Proses perubahan tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan psikologi (Hanafy, 2014).

Proses pembelajaran seringkali dihadapkan pada permasalahan yang terjadi. Permasalahan ini disebut problematika pembelajaran. Problematika pembelajaran

adalah berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Problematika pembelajaran pada umumnya bersifat kompleks, sedangkan kompleksitas tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor utama, yakni: pengaruh budaya, pengaruh sejarah, hambatan praktis, karakter guru sebagai pembelajar, karakter siswa, dan proses belajar (Budyartati, 2016).

Pembelajaran secara praktis tidak bisa dipisahkan dari nilai budaya. Guna menjaga dan melestarikannya, proses belajar merupakan cara transfer yang paling efektif. Dari segi pengaruh sejarah, Indonesia telah beberapa kali merenovasi sistem pendidikan. Dalam kurikulum baru, sejarah menjadi unsur penting dalam proses pembelajaran, baik konsep maupun tujuannya. Sedangkan untuk hambatan praktis dalam proses pembelajaran, tidak jarang guru dibatasi oleh waktu, sumber, fasilitas, undang-undang, dan aturan yang harus diindahkan. Terkadang guru juga dibatasi idealismenya dalam belajar dan pembelajaran oleh kekakuan birokrasi dan manajemen (Budyartati, 2016).

Guru tidak akan mampu memberikan proses belajar mengajar yang optimal apabila manajemen sekolah tidak memberikan dukungan yang memadai terhadap pelaksanaannya, kurikulum tidak siap, sarana dan prasarana tidak memadai, atau bahkan mungkin guru yang kurang piawai dalam menyampaikan ilmu. Karakter guru dipengaruhi oleh lingkungan budaya, masyarakat dimana guru tinggal, keluarga, agama, pengalaman akademis, pengalaman kerja, serta genetika dan pengaruh bawaan yang membentuk cara berfikir guru (Budyartati, 2016). Apabila keseluruhan instrumen sudah dianggap memadai, maka keberhasilan proses pembelajaran terletak pada kepiawaian guru.

2.2.1 Profesionalisme Guru

Guru merupakan salah satu faktor utama dalam pembentukan generasi penerus yang berkualitas, tidak hanya dari sisi intelektualitas tetapi juga tata cara bersikap dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan menurut Mulyasa (Mulyasa, 2013), istilah guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi para peserta didik dan lingkungannya, karena itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.

Profesi dan profesionalisme adalah dua hal yang berkaitan. Profesi didefinisikan sebagai sebuah pekerjaan yang digeluti dengan penuh pengabdian dan dedikasi serta dilandasi oleh keahlian atau keterampilan tertentu (Yesse, 2011). Kata profesionalisme dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.

Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu (Ali Muhson, 2004). Tidak jauh berbeda seperti yang dikemukakan Tilaar (2000), profesionalisme guru adalah sikap profesional yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan, sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Seorang profesional mempunyai keahlian dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya. Guru yang menjalankan tugasnya dengan baik disebut guru yang profesional. Guru yang profesional memiliki empat kompetensi yang terjalin satu dengan lainnya (Shabir, 2015).

2.2.2 Tugas dan Beban Kerja Guru

Kegiatan pembelajaran merupakan proses komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar bisa terjadi apabila pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan (Azis, 2014). Untuk bisa menyampaikan pesan dengan baik, seorang guru harus mengacu pada peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 9 Bab dan 68 pasal. Pada bab IV, termuat penjabaran mengenai Beban Kerja. Beban Kerja Guru mencakup kegiatan pokok: (a) merencanakan pembelajaran; (b) melaksanakan pembelajaran; (c) menilai hasil

pembelajaran; (d) membimbing dan melatih peserta didik; dan (e) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.

Kegiatan pokok guru tersebut adalah beban kerja guru yang dilaksanakan minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu. Sekolah dengan jumlah guru berlebihan akan mengakibatkan guru tidak dapat memenuhi kewajiban mengajarnya. Sedangkan sekolah dengan jumlah guru yang kurang akan mengakibatkan beban mengajar guru semakin berat (Sudarsono, 2015).

2.3 Problematika Pendidikan di Daerah Kepulauan

Kepulauan adalah sebutan untuk kumpulan pulau-pulau atau gugusan beberapa buah pulau. Penduduknya biasanya tinggal di daerah-daerah pesisir. Masyarakat pesisir umumnya memiliki tipikal terbuka. Sifat keterbukaannya tersebut membuat celah dan peluang bagi masuknya proses pendidikan dalam wujud pengaruh, baik ekonomi, budaya, maupun kepercayaan yang datang dari luar. Dinamika kehidupan masyarakat pesisir yang mayoritas adalah berdagang dan nelayan, membangun relasi dengan orang luar. Relasi tersebut membuka peluang bagi mereka yang memiliki visi, misi, dan tujuan tertentu dalam pendidikan. Sayangnya, pendidikan yang awalnya memberikan dinamika positif, mengalami degradasi seiring semakin marjinalnya kehidupan masyarakat pesisir (Kurniawan, 2016).

Sejauh ini, belum banyak penelitian yang mengkaji permasalahan yang ada pada sekolah-sekolah di kawasan terisolir. Hal tersebut mungkin disebabkan karena akses yang tidak mudah. Seringkali permasalahan pendidikan di kepulauan dianggap sama dengan permasalahan pendidikan pada umumnya sehingga luput dari perhatian (Adlim, Gusti, & Zulfadli, 2016).

Penelitian sebelumnya, dilakukan di Pulau Simeulue, membuktikan bahwa permasalahan pendidikan di daerah terpencil apalagi kepulauan sangat berbeda dengan permasalahan di perkotaan (Adlim et al., 2014). Bahkan sebelum penelitian pada tahun 2014 tersebut dilakukan, sudah ada proyek penelitian PPMP yang

dilakukan oleh peneliti lain yang mencakup wilayah Aceh Besar pada tahun 2011. Tindak lanjut penelitian tersebut berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sejauh ini, penelitian pendidikan di daerah kepulauan belum banyak dilaporkan. Fokus kajian tentang pendidikan di kepulauan sangat sedikit, sehingga penelitian ini diharapkan menjadi inisiasi studi ke arah tersebut. Beberapa penelitian lainnya yang berkaitan dengan pendidikan di daerah terpencil membuktikan bahwa problematika yang terjadi pada umumnya adalah kekurangan guru berkualitas (Mulkeen & Chen, 2008), dan kemiskinan dan faktor latar belakang pendidikan orang tua murid (Lyson et al., 2006). Salah satu keunikan sikap guru siswa di daerah terpencil adalah sikap metrosentrik yang pernah dilaporkan oleh Campbell dan Yates (Campbell & Yates, 2011). Sikap metrosentrik adalah selalu berorientasi hidup di perkotaan dan menolak tinggal di pedesaan (Campbell & Yates, 2011).

2.3.1 Sekolah Dasar Negeri di Pulau Gili Iyang

Kabupaten Sumenep merupakan satu dari empat kabupaten yang ada di pulau Madura. Di kabupaten ini terdapat banyak gugusan pulau kecil. Satu diantaranya adalah pulau Gili Iyang. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam kecamatan Dungkek. Dilansir dari laman Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, ada dua desa yang terdapat di pulau ini, yakni desa Banraas dan desa Bancamara, dengan total luas administrasi 921,2 Ha. Terdapat lima sekolah dasar negeri di pulau tersebut, dua sekolah berlokasi di desa Banraas dan sekolah lainnya berada di desa Bancamara. Desa Bancamara memiliki luas administrasi 514,92 Ha.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti pada tahun 2012, akses menuju Pulau Gili Iyang bisa ditempuh melalui perjalanan darat dari pusat Kota Sumenep selama kurang lebih satu jam. Perjalanan selanjutnya ditempuh dengan perahu bermotor selama kurang lebih 50 menit, tergantung kondisi cuaca. Pulau Gili Iyang adalah salah satu tempat dengan kadar oksigen terbaik di dunia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jawa Timur, kadar oksigennya mencapai kisaran angka 21,5%.

2.4 Penelitian Terdahulu

Permasalahan pendidikan yang terjadi di daerah kepulauan seringkali dianggap sebagai permasalahan umum yang juga terjadi di daerah daratan lainnya. Inilah yang membuat permasalahan di daerah kepulauan menjadi luput dari perhatian (Adlim et al., 2014).

Terkait dengan penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang memiliki tema serupa berkenaan dengan yang diangkat peneliti. Penelitian mengenai permasalahan pendidikan yang terjadi daerah kepulauan pernah dilakukan oleh Adlim, Helida Gusti, dan Zulfadli sebagaimana termuat dalam Jurnal Pencerahan terbitan September 2016 (Adlim et al., 2016). Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa permasalahan yang terjadi di pulau Nasi Aceh adalah sebagian besar guru berdomisili di Banda Aceh. Konsekuensinya, guru yang ditugaskan mengajar tidak setiap hari bisa hadir di sekolah. Ketidakhadiran guru di sekolah menyebabkan materi pelajaran tidak dapat disampaikan seluruhnya selama per semester.

Tidak hanya karena faktor ketidakhadiran guru di sekolah, beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan di daerah disebabkan oleh kurangnya guru berkualitas (Mulkeen & Chen, 2008), faktor kemiskinan dan latar belakang orangtua siswa (Lyson et al., 2006), sikap metrosentrik yang ditunjukkan guru (Campbell & Yates, 2011), dan juga akses transportasi yang tidak mudah (Vito & Krisnani, 2017).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan dan mendeskripsikan karakteristik dari fenomena. Salah satu ciri utama penelitian deskriptif adalah pemaparannya yang bersifat naratif, karena penelitian ini digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang menyangkut pertanyaan tentang apa, bagaimana, dan mengapa (Ulfatin, 2015). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Makna adalah

data yang sebenarnya. Maka, hasil pada penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, bukan pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Permasalahan penelitian telah dirumuskan sebelumnya, dengan fokus penelitian pada analisis problematika pembelajaran sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep, didasarkan pada Standar Proses sesuai Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 sebagai acuannya. Melalui metode ini, peneliti diharapkan bisa mendeskripsikan dan menganalisis problematika pembelajaran yang terjadi dan strategi yang diterapkan dalam mengatasinya, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

3.2 Data dan Sumber Data

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data wawancara diperoleh dari kepala sekolah dan guru-guru di sekolah dasar negeri di Desa Bancamara pulau Gili Iyang sebagai informan. Lembar observasi didasarkan pada pengamatan langsung peneliti terkait proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan RPP sebagai acuan sebagaimana termuat dalam Standar Proses. Data untuk studi dokumen diperoleh dari data jumlah guru, jumlah siswa, presensi kehadiran guru dan siswa, silabus dan juga RPP. Pulau Gili Iyang di Kabupaten Sumenep dipilih sebagai lokasi penelitian karena pulau ini merupakan pulau terdekat kedua dari pusat pemerintah Kabupaten Sumenep, yang jarak tempuhnya tidak sejauh pulau lainnya namun tidak bisa ditempuh para guru untuk berangkat mengajar dan kembali ke rumah pada hari yang sama.

Penelitian difokuskan pada tiga sekolah dasar berstatus negeri yang ada di desa Bancamara, yakni SDN Bancamara 1, SDN Bancamara 2, dan SDN Bancamara 3. Desa Bancamara dipilih sebagai lokasi penelitian karena jumlah sekolah dasar negerinya lebih banyak dibandingkan di desa Banraas. Di sekolah dasar negeri tersebut, dua dari tiga kepala sekolahnya merupakan penduduk asli dan berdomisili di pulau Gili Iyang. Jumlah guru untuk SDN Bancamara 1 dan SDN Bancamara 2 masing-masing 7 orang, sedangkan di SDN Bancamara 3 berjumlah 6 orang. Data

jumlah guru tersebut dilansir dari laman Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar wawancara, lembar observasi, dan lembar studi dokumen.

3.4 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisa data dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai permasalahan penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif. Analisis ini mengikuti konsep dari Miles and Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian hingga tuntas, hingga data jenuh (Sugiyono, 2010). Analisis dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan.

3.5 Uji Keabsahan Data

Kemudian untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Data yang diperoleh oleh peneliti kemudian akan dideskripsikan dan dikelompokkan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti akan melakukan pemilahan data untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Problematika Pembelajaran Sekolah Dasar Negeri di Pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep

Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku hasil belajar sifatnya berkelanjutan, fungsional, positif, aktif, dan juga terarah. Proses perubahan

tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari ahli Pendidikan dan psikologi (Hanafy, 2014).

Proses pembelajaran seringkali dihadapkan pada permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut dikenal sebagai problematika pembelajaran. Problematika pembelajaran merupakan berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Problematika pembelajaran pada umumnya bersifat kompleks. Kompleksitas tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor utama, yakni: pengaruh budaya, pengaruh sejarah, hambatan praktis, karakter guru sebagai pembelajar, karakter siswa, dan proses belajar (Budyartati, 2016).

Belum banyaknya penelitian yang mengkaji permasalahan yang ada pada sekolah-sekolah di daerah kepulauan, mungkin disebabkan karena akses menuju lokasi yang tidak mudah. Seringkali permasalahan pendidikan di kepulauan dianggap sama dengan permasalahan pendidikan pada umumnya sehingga luput dari perhatian (Adlim et al., 2016).

Pulau Gili Iyang secara administrasi berada dalam kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Di pulau yang memiliki luas wilayah 921,2 Ha tersebut, terdapat dua desa, yakni desa Banraas dan desa Bancamara. Desa Bancamara memiliki wilayah yang lebih luas yakni 514,92 Ha dan penduduk yang lebih banyak, dibandingkan desa Banraas. Di desa Bancamara juga terdapat lebih banyak sekolah dasar berstatus negeri. Desa Banraas memiliki dua sekolah dasar negeri, sedangkan di desa Bancamara terdapat tiga sekolah dasar negeri, ditambah satu sekolah dasar Islam dan tiga madrasah ibtidaiyah. Penelitian difokuskan pada tiga sekolah dasar negeri yang ada di desa Bancamara, yakni SDN Bancamara 1, SDN Bancamara 2, dan SDN Bancamara 3. Di sekolah dasar negeri tersebut, dua dari tiga kepala sekolahnya merupakan penduduk asli dan berdomisili di pulau Gili Iyang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan Agustus 2018, data guru sekolah dasar negeri di Desa Bancamara yang berstatus pegawai negeri dan honorer, baik yang berasal dari pulau maupun luar pulau Gili Iyang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Data Guru Sekolah Dasar Negeri di Desa Bancamara Pulau Gili Iyang

No.	Keterangan	SDN Bancamara 1	SDN Bancamara 2	SDN Bancamara 3
1.	Kepala Sekolah	Bukan penduduk asli pulau Gili Iyang.	Penduduk asli pulau Gili Iyang.	Penduduk asli pulau Gili Iyang.
2.	Jumlah guru berstatus pegawai negeri (termasuk kepala sekolah)	3 orang	2 orang	4 orang
3.	Jumlah guru berstatus honorer	4 orang	7 orang	4 orang
4.	Jumlah guru berasal dari pulau	4 orang (1 orang berstatus pegawai negeri dan 3 orang berstatus honorer)	8 orang (1 orang berstatus pegawai negeri dan 7 orang berstatus honorer)	5 orang (1 orang berstatus pegawai negeri dan 4 orang berstatus honorer)
5.	Jumlah guru berasal dari luar pulau	3 orang (2 orang berstatus pegawai negeri dan 1 orang berstatus honorer)	1 orang (berstatus pegawai negeri)	3 orang (berstatus pegawai negeri)
6.	Total jumlah guru (termasuk kepala sekolah)	7 orang 7 orang*	9 orang 7 orang*	8 orang 6 orang*

Catatan: *dilansir dari laman Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perbedaan total jumlah guru di SDN Bancamara 2 dan SDN Bancamara 3, sebagaimana terlihat pada Tabel 1, diakui oleh kepala sekolah masing-masing karena belum semua guru dimasukkan dalam program data. Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan peneliti, papan yang berisi data guru maupun siswa yang dipajang di dinding kantor sekolah, terutama untuk data jumlah guru dan siswa, belum diperbaharui sepenuhnya. Untuk itu, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2, perbandingan jumlah guru dan siswa dalam satu sekolah serta kurikulum yang digunakan, diperoleh melalui wawancara dengan masing-masing kepala sekolah dasar negeri di desa Bancamara Gili Iyang.

Tabel 2 Perbandingan Jumlah Guru dan Siswa Sekolah Dasar Negeri di Desa Bancamara Pulau Gili Iyang

No.	Keterangan	SDN Bancamara 1	SDN Bancamara 2	SDN Bancamara 3
1.	Jumlah guru (termasuk kepala sekolah)	7 orang	9 orang	8 orang
2.	Jumlah siswa	32 orang	62 orang	39 orang
3.	Kurikulum yang dipakai	Kurikulum 2013 untuk kelas 1-4 sejak tahun 2018. Kelas 5 dan 6 menggunakan KTSP.	Kurikulum 2013	Kurikulum 2013

Keterangan : Data diolah dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Bancamara 1, 2, dan 3 Gili Iyang Sumenep.

Berdasarkan Tabel 2, dilihat dari jumlah siswa dalam satu sekolah dasar negeri, tidak banyak jumlah guru yang dibutuhkan. Akan tetapi, bila dilihat dari jumlah tingkatan kelas yang ada, dibutuhkan setidaknya satu orang guru untuk mengajar satu tingkatan kelas. Latar belakang kebutuhan ini didasarkan pada persiapan guru untuk mengajar, sehingga berimbas pada kelancaran proses pembelajaran yang akan dilalui. Seorang guru diharapkan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan tugasnya di kelas. Salah satu isi Standar Proses tersebut adalah mengenai kesiapan guru terkait dengan tahapan pembelajaran yang akan dilakukan. Tahapan tersebut yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran.

Tahap perencanaan pembelajaran ditujukan untuk melihat persiapan seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP tersebut dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses, disebutkan bahwa setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP

secara lengkap dan sistematis. Tujuan penyusunan RPP agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Data yang dihimpun peneliti melalui wawancara dengan kepala sekolah di tiga sekolah dasar negeri pada desa Bancamara, silabus dan RPP adalah acuan bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun dalam proses penyusunannya, diakui oleh salah satu kepala sekolah, dilakukan oleh pihak luar sekolah. Sebagaimana yang dituturkan oleh HS, dalam petikan wawancara berikut ini.

“Guru yang tidak punya RPP adalah guru gila. RPP memang penting, tetapi di sekolah ini, guru yang rajin masuk itu jauh lebih penting. Prinsipnya di (sekolah) sini, guru mau mengajar saja sudah termasuk keuntungan (bagi sekolah), apalagi sampai memenuhi 25 hari kerja dalam sebulan. Jadi tidak usah (dibebani) membuat RPP lagi.” (HS-28/08/2018-menit 31.20 - 33.34).

Lebih lanjut menurut kepala sekolah tersebut, silabus dan RPP wajib dimiliki oleh setiap guru. Ketika sewaktu-waktu ada kunjungan dari dinas terkait, guru diharapkan bisa menunjukkan RPP yang dimiliki, walaupun terkadang dalam proses pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan isi RPP tersebut. Disadari oleh kepala sekolah tersebut, ketidaksesuaian pelaksanaannya dikarenakan kondisi di sekolah yang memang mengharuskan seperti itu.

Saat pertanyaan yang sama diajukan kepada kepala sekolah SDN Bancamara 3, AB hanya menyebutkan bahwa setiap guru di SDN Bancamara 3 diwajibkan memiliki RPP. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai penyusunan RPP yang dilakukan oleh pihak luar sekolah, AB menjawab sebagaimana petikan wawancara berikut ini.

“Sebenarnya tidak harus dibuat sendiri (oleh guru). Ada RPP yang dikelola oleh tim pengawas maupun KKG, lalu kita tinggal melaksanakannya. Walaupun, sebaiknya memang membuat sendiri.” (AB-29/08/2018-menit 31.57-32.12).

Sementara itu, kepala sekolah SDN Bancamara 2 secara tersirat mengiyakan ketika ditanya mengenai keharusan seorang guru menyusun sendiri RPP yang akan digunakan. Kondisi tersebut berbeda dengan yang dialami dua sekolah dasar negeri

lainnya, karena jumlah guru di SDN Bancamara 2 juga lebih banyak. Hal tersebut mengakibatkan jarang sekali seorang guru SDN Bancamara 2 mengajar lebih dari dua kelas.

Pada saat penelitian dilakukan, pihak sekolah sedang mempersiapkan proses akreditasi yang akan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan hasil studi dokumen melalui RPP yang dimiliki oleh ketiga sekolah dasar negeri tersebut, didapatkan bahwa RPP sudah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema, yang komponennya terdiri dari: (a) Identitas sekolah; (b) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema; (c) Kelas/semester; (d) Materi pokok; (e) Alokasi waktu; (f) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD; (g) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; (h) Materi pembelajaran; (i) Metode pembelajaran; (j) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran; (k) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; (l) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan (m) Penilaian hasil pembelajaran.

Setelah tahap perencanaan pembelajaran dilakukan, guru akan masuk pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Tahap pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 mengenai Standar Proses, pelaksanaan pembelajaran tersebut mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup.

Pada kegiatan pendahuluan, seorang guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Kemudian guru akan masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan

sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran.

Tahapan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Hal-hal yang masuk dalam evaluasi adalah: (a) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; (b) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; (c) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan (d) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti di SDN Bancamara 3 pada tanggal 29 Agustus 2018, jumlah guru yang hadir sebanyak empat orang. Terdiri dari satu kepala sekolah, dua guru berstatus pegawai negeri, dan satu guru berstatus honorer. Karena kepala sekolah tidak mendapat tugas mengajar, maka tiga orang guru mengajar enam kelas di sekolah tersebut.

Kondisi yang serupa juga terjadi di SDN Bancamara 1. Karena ketidakhadiran beberapa orang guru, mengharuskan guru yang hadir pada saat itu untuk mengajar dua kelas. Namun, berbeda halnya dengan SDN Bancamara 2. Berhubung sebagian guru di sekolah tersebut berasal dari pulau Gili Iyang, maka jumlah guru yang hadir lebih banyak dibandingkan kehadiran guru pada dua sekolah lainnya. Perbedaan antara ketiga sekolah ini membuat tahapan pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam RPP.

Secara garis besar, di SDN Bancamara 1 dan SDN Bancamara 3, kegiatan pendahuluan dalam pelaksanaan pembelajaran sudah dilakukan berdasarkan RPP yang telah tersedia. RPP disusun untuk digunakan di masing-masing tingkat kelas. Ketimpangan jumlah guru yang hadir dengan jumlah siswa dan tingkatan kelas yang ada, membuat seorang guru harus mengajar lebih dari satu kelas. Maka tidak jarang RPP tidak sepenuhnya dijadikan acuan ketika proses pembelajaran. Guru harus bisa berimprovisasi terkait dengan seberapa banyak waktu yang akan digunakan. Dalam

proses pembelajaran, hambatan praktis yang seringkali ditemui adalah guru dibatasi waktu, sumber, fasilitas, undang-undang, dan aturan yang harus diindahkan. Terkadang guru juga dibatasi idealismenya dalam belajar dan pembelajaran oleh kekakuan birokrasi dan manajemen (Budyartati, 2016).

Ketika seorang guru diharuskan mengajar dua kelas namun dengan alokasi waktu yang terbatas, tidak jarang akan ada bagian-bagian dalam RPP yang akan terlewat. Mata pelajaran, dua tingkatan kelas, dan juga materi yang disampaikan menjadi alasan utama mengapa alokasi waktu berjalan tidak sesuai dengan RPP. Sebagaimana yang diungkapkan oleh NI, salah seorang guru, dalam petikan wawancara berikut ini.

“Jika harus disesuaikan dengan RPP, kemungkinannya kecil sekali. Jumlah guru yang masuk setiap hari tidak bisa diperkirakan. Dari segi kegiatan pendahuluan, dan sedikit kegiatan inti, masih bisa mengikuti panduan dari RPP. Tapi alokasi waktu yang digunakan akan sedikit meleset, apalagi kalau mengajar dua kelas. Saya pernah mengajar enam kelas pada tahun pertama ditempatkan disini.” (NI-29/08/2018).

Pernyataan NI tersebut serupa dengan yang diungkapkan oleh HS, salah seorang guru dari SDN Bancamara 1.

“Pelaksanaannya bergantung pada kondisi di lapangan. RPP menjadi pegangan yang tidak wajib dilakukan. Mengajar lebih dari satu kelas, itu sudah biasa. Kalau dilihat dari jumlah siswa, seorang guru masih bisa mengendalikan dua kelas sekaligus. Tetapi kalau dilihat dari jumlah tingkatan kelas yang harus diajar, jelas guru akan kerepotan. Ini nantinya berkaitan dengan (alokasi) waktu yang akan digunakan.” (HS-28/08/2018).

Sementara itu di SDN Bancamara 2, proses pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan RPP yang disusun. Faktor jumlah guru yang lebih banyak dibandingkan dua sekolah dasar negeri lainnya, dan juga delapan dari sembilan guru SDN Bancamara 2 berasal dari pulau Gili Iyang, bisa dipastikan hampir setiap harinya masing-masing kelas terisi seorang guru. Tidak ada kendala terkait alokasi waktu dalam tahapan kegiatan pendahuluan, inti, maupun penutup. Ketiga tahapan kegiatan tersebut juga dilalui sebagaimana RPP yang disusun sebagai acuan. Setelah proses pelaksanaan pembelajaran dilalui, selanjutnya akan masuk pada penilaian proses pembelajaran.

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaiannya digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan pembelajaran, pengayaan, atau pelayanan konseling. Hasil tersebut juga digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan.

Penilaian pembelajaran yang dilakukan saat proses pembelajaran menggunakan: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Sedangkan penilaian pembelajaran yang dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir proses pembelajaran menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil penilaian akhir diperoleh dari gabungan penilaian proses dan penilaian hasil pembelajaran. Penilaian pembelajaran tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 mengenai Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Melalui penilaian pembelajaran, siswa terdorong untuk belajar lebih giat, sedangkan guru terdorong untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mendorong sekolah untuk lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas manajemen sekolah (Widoyoko Tayibnapis, 2000).

Berdasarkan hasil wawancara, tiga sekolah dasar negeri di desa Bancamara melakukan penilaian pembelajaran selama proses pembelajaran dan di akhir proses pembelajaran. Penilaian pembelajaran didapat dari tes tulis berupa ulangan harian, yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

Berdasarkan hasil studi dokumen, berupa RPP dari ketiga sekolah dasar negeri tersebut, di bagian penilaian pembelajaran memuat beberapa komponen. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 mengenai Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang didalamnya memuat tentang penilaian pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran didasarkan pada Indikator Pencapaian Kompetensi. Teknik penilaiannya berupa tes lisan dan tes tulis, dengan bentuk instrumennya menggunakan uraian ataupun isian. Kriteria penilaian diperoleh dari tiga hal, yakni produk (hasil diskusi yang mencakup konsep), performansi (mencakup kerjasama dan

partisipasi), dan lembar penilaian. Nilai siswa diperoleh dari jumlah skor, yang dibagi dengan jumlah skor maksimal, kemudian dikalikan 10.

Problematika yang terjadi di sekolah dasar negeri di desa Bancamara terletak bukan hanya pada penyusunan RPP yang dilakukan oleh pihak luar sekolah, tetapi juga pada pelaksanaan isi RPP. Pelaksanaan pembelajaran cenderung mengabaikan alokasi waktu. Hal tersebut terjadi karena seorang guru bisa jadi mengajar lebih dari satu kelas. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh jumlah guru yang ada dalam satu sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HS, kepala sekolah SDN Bancamara 1, diperoleh beberapa hal yang dikategorikan sebagai permasalahan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

“Jumlah guru di sekolah masih kurang. Karena kurang, maka satu orang guru bisa mengajar lebih dari dua kelas. Kalau dikategorikan sebagai pembelajaran kelas rangkap, saya rasa tidak juga. Secara teori, pembelajaran kelas rangkap itu tidak seperti yang terjadi disini.” (HS-28/08/2018).

Ketidakhadiran guru disebabkan oleh banyak hal. Misalnya, jarak tempuh dari tempat asal ke sekolah. Tidak semua guru merupakan penduduk asli desa Bancamara. Berdasarkan data yang termuat di Tabel 1 Data Guru Sekolah Dasar Negeri di Desa Bancamara Gili Iyang, menunjukkan bahwa 2/3 dari total jumlah guru berstatus pegawai negeri di desa tersebut, tidak berdomisili di pulau Gili Iyang. Para guru tersebut memiliki suami atau istri yang bekerja dan menetap di daratan.

Kehadiran seorang guru di kelas sangat penting artinya, apalagi di tingkat sekolah dasar. Dalam proses belajar mengajar, guru memegang peranan sebagai sutradara sekaligus aktor. Guru juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran di kelas (Sutarmanto, 2015).

Ketidakhadiran para guru karena faktor jarak tempat tinggal ke sekolah, seyogyanya menjadikan guru merefleksi kembali tanggung jawab yang berkaitan dengan profesinya. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karenanya, seorang guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin (Mulyasa, 2013).

Profesi dan profesionalisme adalah dua hal yang berkaitan. Kata profesionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Sedangkan profesi didefinisikan sebagai sebuah pekerjaan yang digeluti dengan penuh pengabdian dan dedikasi serta dilandasi oleh keahlian atau keterampilan tertentu (Yesse, 2011).

Seorang guru yang menjalankan tugasnya dengan baik disebut guru yang profesional. Profesionalisme guru adalah sikap profesional yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan, sebagai profesi, dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka (Tilaar, 2000). Profesionalisme juga diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya (Ali Muhson, 2004).

Berkenaan dengan ketidakhadiran guru di sekolah, kebijakan harus diambil para kepala sekolah dasar negeri di desa Bancamara pulau Gili Iyang. Salah satu upaya yang ditempuh HS, kepala sekolah SDN Bancamara 1, adalah dengan menjaga komunikasi antar guru apabila ada yang tidak bisa hadir di sekolah. Hal penting lainnya adalah mengupayakan tetap ada guru yang masuk, minimal 3-4 orang. Konsekuensinya memang seorang guru mengajar akan dua kelas. Prinsip HS, sekolah harus tetap berjalan, bagaimanapun kondisinya.

Permasalahan lain yang muncul adalah ketidakhadiran guru honorer yang sebagian besar merupakan penduduk asli pulau Gili Iyang. Kepala sekolah SDN Bancamara 1 mengakui bahwa kesejahteraan guru honorer belum sepenuhnya terjamin. Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah untuk gaji guru honorer hanya 15 persen untuk setiap tiga bulan. Kalau dikalkulasikan, dengan tanggungan keluarga, bisa jadi kurang mencukupi. Ini yang menyebabkan guru honorer mencari tambahan pendapatan lainnya (di luar).

Di satu sisi, kepala sekolah SDN Bancamara 1 berharap pembelajaran bisa berjalan optimal. Tapi dengan pendapatan guru honorer yang hanya sekian, kepala sekolah tidak bisa mengharapkan hal yang lebih. Distribusi guru di pulau Gili Iyang

memang terlihat kurang. Ditinjau dari segi jumlah guru yang ada dan total jumlah siswa, pertimbangan pemerintah (terkait) mungkin didasarkan pada dua hal. Pertama, satu orang guru untuk satu kelas. Kedua, satu guru untuk 20 orang siswa.

Sementara itu, hasil wawancara dengan ID, kepala sekolah SDN Bancamara 2 didapatkan beberapa hal yang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di SDN Bancamara 1.

“Sebagai informasi awal, jumlah guru honorer di sekolah ini terbanyak dibandingkan SDN Bancamara 1 dan Bancamara 3. Total jumlah siswa juga paling banyak. Jadi walaupun dana BOS-nya paling besar diantara dua sekolah lainnya, pengaruhnya sama saja, karena alokasi dana BOS untuk guru honorer juga paling banyak. Sebagai kepala sekolah, harus ada kebijakan yang ditempuh guna mengatasi masalah kekurangan guru. Kalau tidak, imbasnya nanti ke siswa. Berhubung pemerintah lambat dalam pengangkatan pegawai negeri sipil, kebijakan sekolah adalah dengan merekrut *fresh graduate* untuk bergabung di sekolah ini.” (ID-30/08/2018)

Banyaknya jumlah guru honorer di SDN Bancamara 2 membuat kepala sekolah harus bijak dalam mengelola dana BOS, terutama untuk alokasi kesejahteraan guru honorer. Diakui ID, hal tersebut adalah hal yang berat. Bila diharuskan mengikuti aturan BOS, akan terasa dilematis karena guru honorer juga harus mendapat perhatian. Selayaknya juga dijadikan pertimbangan, apakah jumlah gaji honorer yang diterima manusiawi atau tidak.

Keberhasilan proses pembelajaran terletak pada kepiawaian guru. Guru tidak akan mampu memberikan proses belajar mengajar yang optimal apabila manajemen sekolah tidak memberikan dukungan yang memadai terhadap pelaksanaannya. Kurang optimalnya proses pembelajaran juga disebabkan oleh faktor kurikulum tidak siap, sarana dan prasarana tidak memadai, atau bahkan mungkin guru yang kurang piawai dalam menyampaikan ilmu (Budyartati, 2016).

Kebutuhan ekonomi setiap orang berbeda. Kebutuhan guru honorer yang sudah berkeluarga berbeda dengan yang belum berkeluarga. Ketika gaji guru honorer dirasa belum mencukupi, pasti memunculkan alasan untuk berhenti mengajar. Dukungan dari sekolah diperlukan guna kelancaran proses pembelajaran yang optimal. Untuk

itu, perlu adanya pendekatan kekeluargaan, agar guru honorer membatalkan niatnya. Kepala sekolah SDN Bancamara 2 menuturkan, upaya tersebut ditempuh demi siswa.

Kegiatan pembelajaran merupakan proses komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar bisa terjadi apabila pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan (Azis, 2014). Untuk bisa menyampaikan pesan dengan baik, seorang guru harus mengacu pada peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru terdiri dari 9 Bab dan 68 pasal. Pada bab IV, tercantum penjabaran mengenai Beban Kerja Guru yang mencakup beberapa kegiatan pokok. Kegiatan pokok guru tersebut adalah beban kerja guru yang dilaksanakan minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu. Sekolah dengan jumlah guru berlebihan akan mengakibatkan guru tidak dapat memenuhi kewajiban mengajarnya. Sedangkan sekolah dengan jumlah guru yang kurang akan mengakibatkan beban mengajar guru semakin berat (Sudarsono, 2015).

Faktor kekurangan guru menjadi penyebab ditutupnya SDN Bancamara 4. Selain itu, secara umum, permasalahan yang terjadi di pulau Gili Iyang adalah jumlah sekolah dasar yang cukup banyak. Dengan total tujuh sekolah dasar di desa Bancamara, seyogyanya menjadi pertimbangan apakah sudah memenuhi syarat atau tidak.

Walaupun tidak menampik bahwa setiap tahunnya ada persaingan guna mendapatkan siswa baru, kepala sekolah SDN Bancamara 2 berpendapat bahwa memilih lokasi belajar itu hak setiap wali siswa. Dengan banyaknya jumlah sekolah dasar di pulau Gili Iyang, kepala sekolah yang dulunya pernah mengajar di SDN Bancamara 4 tersebut mengungkapkan bahwa tampilan yang ditunjukkan pada masyarakat menjadi nilai tersendiri. Tampilan yang dimaksud berupa transparansi maupun kegiatan-kegiatan sekolah, misalnya pramuka dan keikutsertaan dalam lomba seni.

Dibandingkan dengan SDN Bancamara 1 dan SDN Bancamara 3, rata-rata guru SDN Bancamara 2 merupakan penduduk asli pulau Gili Iyang. Hal tersebut

memperkecil kemungkinan bagi para guru untuk tidak hadir mengajar ke sekolah, kecuali karena latar belakang ekonomi sebagai guru honorer.

Lebih lanjut, kepala sekolah SDN Bancamara 2 menambahkan bahwa guru honorer di pulau Gili Iyang tidak sama dengan guru honorer di kota. Guru honorer di kota sifatnya membantu guru pegawai negeri. Guru honorer di sekolah pulau Gili Iyang tugasnya sekaligus sebagai guru kelas. Jadi, bukan lagi sekedar membantu guru pegawai negeri. Bila kepala sekolah diwajibkan mengikuti aturan, misalnya guru honorer tidak hadir ke sekolah selama tiga hari, sanksinya harus bersedia dilepas. Hal itu yang dirasa kepala sekolah SDN Bancamara 2 tidak bisa diberlakukan di sekolah tersebut.

Selain itu, menurut kepala sekolah SDN Bancamara 2, masih ada orangtua yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak. Contoh kasus, ketika orangtua berdagang ke luar provinsi, terkadang anak juga dibawa. Resikonya, pasti anak tidak masuk sekolah. Akan dimaklumi kalau durasi tidak masuk sekolah hanya beberapa hari saja. Biasanya, hal tersebut berlangsung selama sebulan atau bahkan lebih.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan AB, kepala sekolah SDN Bancamara 3, diperoleh keterangan sebagai berikut.

“Selain faktor kurangnya ketersediaan guru, kendala yang sering terjadi adalah ketika guru yang berasal dari luar pulau Gili Iyang berhalangan hadir. Mau tidak mau, guru yang hadir harus mengajar rangkap. Di sekolah ini, yang terjadi justru bukan hanya mengajar kelas rangkap, tetapi multi rangkap.” (AB-29/08/2018).

Kondisi yang demikian, diakui kepala sekolah SDN Bancamara 3, menyebabkan keberadaan RPP hanya terkesan sebagai pajangan saja. RPP tetap ada dan dijadikan acuan, rambu-rambunya tetap diperhatikan. Karena diburu waktu, yang terjadi di lapangan memang banyak kekurangan. Akan ada bagian-bagian yang terlampaui (terlewat).

Selain itu, jumlah siswa baru yang mendaftar sekolah merosot tiap tahunnya. Penyebab yang pertama, karena ada beberapa orangtua yang mampu secara finansial untuk menyekolahkan anaknya ke luar pulau Gili Iyang, ke sekolah-sekolah yang dirasa lebih maju daripada di pulau Gili Iyang. Yang kedua, faktor jumlah lembaga

yang setara dengan sekolah dasar negeri ada banyak. Persaingan terbilang ketat untuk mendapatkan siswa setiap tahunnya.

Kaitannya dengan dana BOS yang dialokasikan untuk gaji honorer, secara aturan seharusnya hanya 15 persen saja. Tetapi di SDN Bancamara 3, kepala sekolah menetapkan sebanyak 20 persen. Anggarannya untuk tiga bulan, tetapi penyalurannya untuk tiap bulan. Maka, ada pos lainnya yang dikurangi. Memang menyalahi aturan, diakui oleh kepala sekolah SDN Bancamara 3, tetapi menurutnya ini demi kesejahteraan guru honorer. Dengan begitu, diharapkan guru honorer tetap mau masuk dan mengajar. Sebagaimana yang diungkapkan AB dalam petikan wawancara berikut ini.

“Dulu gaji guru honorer (di sekolah ini) dibayarkan untuk satu bulan. Sekarang gaji guru honorer diberikan berdasarkan jumlah persentase kehadirannya di sekolah. Untuk meminimalisir kecemburuan yang terjadi diantara sesama guru honorer. Kalau jumlah kehadiran antara guru honorer yang satu dengan yang lainnya tidak sama, tetapi gaji yang diterima sama, ini berpotensi menimbulkan konflik. Maka harus ada kebijakan yang diambil.”
(AB-29/08/2018)

Dana BOS yang dikeluarkan jumlahnya tetap, hanya saja alokasinya lebih banyak diberikan pada guru honorer yang lebih rajin masuk dan mengajar di sekolah. Jadi, kebijakan tersebut diharapkan bisa memotivasi guru untuk lebih rajin.

Pemberlakuan kebijakan yang berbeda dengan sekolah lain, pernah ditempuh SDN Bancamara 3 terhadap guru berstatus pegawai negeri yang presensi kehadirannya sedikit. Guru berstatus pegawai negeri yang berhalangan hadir, dikenakan kontribusi setiap harinya. Besarnya nominal kontribusi tersebut sudah disepakati bersama. Kontribusi tersebut dialokasikan bagi guru honorer yang hadir di sekolah. Diakui oleh kepala sekolah SDN Bancamara 3, kebijakan tersebut sempat berjalan lancar. Namun, pasti tersimpan kekurangan dibalik setiap kebijakan yang diterapkan. Salah satunya adalah fakta bahwa besarnya sisa gaji yang diterima guru berstatus pegawai negeri, ternyata masih jauh lebih besar daripada sejumlah nominal yang harus dibayarkan sebagai kontribusi pengganti ketidakhadiran. Hal ini menyebabkan kebijakan internal SDN Bancamara 3 tersebut tidak diterapkan lagi.

Ada kesepakatan dan ketentuan tersendiri terkait kontribusi tersebut. Ketentuannya adalah guru pegawai negeri harus memenuhi 50 persen plus 1 hari dari jumlah total hari efektif dalam satu bulan. Kalau tidak bisa memenuhi jam kerja tersebut, baru ada kontribusi yang diberikan. Jadi tidak serta-merta gaji dipotong untuk kontribusi begitu saja.

Secara garis besar, dari hasil penelitian yang dilakukan, problematika pembelajaran yang terjadi di tiga sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang adalah sebagai berikut:

- a. Distribusi guru di pulau Gili Iyang masih kurang. Terutama guru yang berstatus pegawai negeri. Jumlah guru dalam satu sekolah berpengaruh pada kelancaran proses pembelajaran di dalam kelas.
- b. Ketidakhadiran guru yang tidak berdomisili di pulau Gili Iyang juga mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab dan kedisiplinan guru. Seorang guru yang mengajar lebih dari satu kelas, merupakan hal yang biasa terjadi di pulau tersebut.
- c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tetap dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas guru. Akan tetapi, ada bagian-bagian yang terlewat karena kondisi guru yang diharuskan mengajar dua kelas, bahkan lebih.
- d. Lebih banyak guru berstatus honorer daripada guru pegawai negeri dalam satu sekolah. Kepala sekolah membuat kebijakan dengan merekrut guru honorer yang merupakan penduduk sekitar, guna memenuhi kebutuhan akan jumlah guru. Perekrutan penduduk sekitar dimaksudkan agar tetap ada guru yang bisa hadir ke sekolah, tanpa alasan faktor cuaca maupun keterbatasan transportasi air.
- e. Belum memadainya jam operasional transportasi air yang tersedia menyebabkan guru non-penduduk pulau terkadang tidak hadir ke sekolah.
- f. Dengan luas administrasi 514,92 Ha, terdapat tiga sekolah dasar berstatus negeri, satu sekolah dasar Islam, dan tiga madrasah ibtidaiyah di desa Bancamara. Bila dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk dan luasnya desa, total jumlah sekolah dasar negeri dan swasta terlalu banyak.

- g. Jumlah sekolah dasar yang terlalu banyak, mempengaruhi jumlah siswa yang masuk ke sekolah dasar negeri setiap tahunnya.
- h. Jumlah siswa baru setiap tahunnya berpengaruh pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 15 persennya dialokasikan untuk kesejahteraan guru honorer per tiga bulan sekali. Semakin banyak jumlah siswa dalam satu sekolah, maka semakin besar pula dana BOS yang didapat. Begitu juga sebaliknya.
- i. Karena jumlah guru honorer lebih banyak daripada guru pegawai negeri, sedangkan dana BOS yang didapat tergantung pada jumlah siswa, maka setiap guru honorer mendapatkan tunjangan kesejahteraan dengan kisaran Rp 200.000 – Rp 250.000 untuk per bulannya. Ini termasuk kebijakan kepala sekolah, dengan tidak berpatokan pada aturan pengalokasian dana BOS.
- j. Karena alasan pada poin (i), guru honorer biasanya mencari tambahan pendapatan lainnya di luar sekolah, salah satunya dengan berdagang. Aktivitas berdagang inilah yang kerap kali membuat guru tidak hadir di sekolah. Guru biasanya berdagang ke luar provinsi.
- k. Selama tahun 2014-2016 ada tunjangan kepulauan bagi para guru honorer. Besarannya Rp 1.500.000 per bulan, dan dicairkan untuk periode tiga bulan sekali. Semenjak tunjangan kepulauan dicabut, melatarbelakangi alasan guru honorer untuk berdagang. Tunjangan kepulauan dicabut karena pulau Gili Iyang dianggap bukan termasuk daerah kepulauan lagi. Pulau Gili Iyang dikategorikan sebagai daratan. Secara geografis dan kehidupan masyarakatnya, pulau Gili Iyang belum bisa dimasukkan dalam kategori daratan, karena belum terdapat fasilitas layaknya di daratan, seperti bank, kantor pos, puskesmas, dan kantor pemerintahan lainnya.

Problematika pembelajaran dapat ditelusuri dari jalannya pembelajaran. Sementara keberhasilan pembelajaran dapat ditelusuri dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh faktor-faktor, yakni *input*, proses, dan *output*. Komponen *input* terdiri dari Dinas Pendidikan, guru, siswa, manajemen sekolah, dan lingkungan. Lingkungan adalah kondisi masyarakat sekitar sekolah.

Merujuk pada hasil penelitian, problematika pembelajaran yang terjadi di pulau Gili Iyang dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya. Problematika yang bersumber dari Dinas Pendidikan antara lain: (a) Distribusi guru di pulau Gili Iyang masih kurang; (b) Lebih banyak guru berstatus honorer daripada guru pegawai negeri dalam satu sekolah; (c) Total jumlah sekolah dasar negeri dan swasta terlalu banyak; (d) Jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah dasar negeri setiap tahunnya; dan (e) Dicabutnya tunjangan kepulauan bagi guru honorer. Sementara problematika yang bersumber dari guru, adalah: (a) Ketidakhadiran guru yang tidak berdomisili di pulau Gili Iyang; (b) Beberapa bagian dalam RPP terlewat pelaksanaannya; dan (c) Guru tidak hadir ke sekolah karena kerap berdagang ke luar provinsi.

Sedangkan problematika yang bersumber dari manajemen sekolah, antara lain: (a) Ketidakhadiran guru yang tidak berdomisili di pulau Gili Iyang; (b) Guru mengajar lebih dari satu kelas; (c) Beberapa bagian dalam RPP terlewat pelaksanaannya; (d) Jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah dasar negeri setiap tahunnya; dan (e) Alokasi dana BOS untuk kesejahteraan guru honorer. Dan problematika yang bersumber dari lingkungan adalah belum memadainya jam operasional transportasi air yang tersedia.

Problematika pembelajaran terjadi karena beberapa faktor utama, yakni: pengaruh sejarah, pengaruh budaya, hambatan praktis, karakter guru, karakter siswa, dan proses belajar (Budyartati, 2016). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah di desa Bancamara Gili Iyang Sumenep, tidak muncul problematika pembelajaran yang bersumber dari pengaruh sejarah, pengaruh budaya, serta karakter siswa.

Penelitian yang mengangkat permasalahan pendidikan yang terjadi di daerah kepulauan belum banyak ditemui. Selain karena alasan akses menuju lokasi yang tidak mudah, seringkali permasalahan yang terjadi di daerah kepulauan dianggap sebagai permasalahan umum yang juga terjadi di daerah daratan lainnya. Hal ini yang membuat permasalahan di daerah kepulauan luput dari perhatian (Adlim et al., 2014).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan di daerah adalah kekurangan guru berkualitas (Mulkeen & Chen, 2008), faktor kemiskinan dan

latar belakang orangtua siswa (Lyson et al., 2006), sikap metrosentrik yang dimiliki oleh beberapa guru (Campbell & Yates, 2011). Sikap metrosentrik adalah sikap yang selalu berorientasi pada hidup di perkotaan dan menolak untuk hidup di pedesaan (Campbell & Yates, 2011).

Penelitian mengenai permasalahan pendidikan yang terjadi daerah kepulauan pernah dilakukan oleh Adlim, Helida Gusti, dan Zulfadli sebagaimana termuat dalam Jurnal Pencerahan terbitan September 2016. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa permasalahan yang terjadi di pulau Nasi Aceh adalah sebagian besar guru berdomisili di Banda Aceh, sehingga guru yang ditugaskan mengajar tidak setiap hari bisa hadir di sekolah. Ketidakhadiran guru di sekolah menyebabkan materi pelajaran tidak dapat disampaikan seluruhnya selama per semester.

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di desa Bancamara pulau Gili Iyang, selain karena distribusi guru yang kurang merata, faktor ketidakhadiran guru di sekolah juga menjadi problematika selama proses pembelajaran. Distribusi guru yang kurang merata ditandai dengan adanya ketimpangan jumlah guru berstatus pegawai negeri antara SDN Bancamara 1, SDN Bancamara 2, dan SDN Bancamara 3. Sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 3, yang datanya diperoleh dari hasil wawancara dengan masing-masing kepala sekolah dasar negeri tersebut.

Tabel 3 Perbandingan Jumlah Guru Pegawai Negeri dan Siswa di Desa Bancamara Pulau Gili Iyang

No.	Keterangan	SDN Bancamara 1	SDN Bancamara 2	SDN Bancamara 3
1.	Jumlah guru pegawai negeri	3 orang	2 orang	4 orang
2.	Jumlah siswa	32 orang	62 orang	39 orang

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, walaupun distribusi guru pegawai negeri kurang merata di pulau Gili Iyang, tidak ada alokasi penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk formasi guru sekolah dasar pada Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2018. Hal tersebut bisa dipantau dari laman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Sementara itu, faktor ketidakhadiran guru di sekolah disebabkan karena guru tidak berdomisili di pulau Gili Iyang. Guru tersebut bukan penduduk asli pulau, dan

memiliki suami atau istri yang bekerja dan menetap di daratan. Dari wawancara dengan ketiga kepala sekolah dasar negeri di desa Bancamara, berdasarkan Tabel 1, diperoleh hasil bahwa 2/3 dari total guru pegawai negeri yang ditugaskan di desa Bancamara Gili Iyang tidak berdomisili di pulau Gili Iyang. Sebagaimana hasil penelitian yang pernah dilaporkan oleh Campbell dan Yates (Campbell & Yates, 2011), salah satu keunikan guru di daerah adalah sikap metrosentrik. Sikap metrosentrik adalah selalu berorientasi hidup di perkotaan dan menolak tinggal di pedesaan (Campbell & Yates, 2011). Rendahnya minat guru mengajar di daerah, selain karena faktor sikap metrosentrik yang ditunjukkan, juga disebabkan oleh minimnya akses transportasi (Vito & Krisnani, 2017).

4.2 Strategi dalam Mengatasi Problematika Pembelajaran Sekolah Dasar Negeri di Pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep

Mengatasi problematika yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, bisa ditempuh melalui berbagai alternatif penyelesaian. Untuk mengatasi problematika pembelajaran sekolah dasar negeri yang terjadi di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep, ada beberapa strategi yang ditempuh sekolah berdasarkan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Bancamara 1, SDN Bancamara 2, dan SDN Bancamara 3, strategi tersebut diantaranya:

- a. Menjaga baik komunikasi antar guru, berkaitan dengan kehadiran guru di sekolah guna kelancaran proses pembelajaran. Upaya ini dimaksudkan untuk menghindari kurangnya tenaga guru yang akan mengisi materi di setiap kelas.
- b. Merekrut *fresh graduate* menjadi guru honorer. *Fresh graduate* atau lulusan terbaru ini merupakan penduduk asli pulau Gili Iyang. Upaya tersebut ditempuh kepala sekolah SDN Bancamara 2. Dilatarbelakangi oleh hanya tersedianya dua orang guru berstatus pegawai negeri di sekolah dasar tersebut, membuat kepala sekolah masih menerapkan strategi ini. Diharapkan dengan ditempuhnya strategi tersebut, bisa mengupayakan tidak ada kelas yang tidak diisi oleh seorang guru setiap harinya. Perekrutan lulusan terbaru yang merupakan penduduk asli pulau,

dimaksudkan untuk minimalisir ketidakhadiran guru ke sekolah karena alasan cuaca dan terbatasnya jam operasional transportasi air.

- c. Mengupayakan pendekatan secara kekeluargaan. Strategi ini ditempuh oleh kepala sekolah SDN Bancamara 2 dengan tujuan membuat nyaman para guru honorer. Di SDN Bancamara 2, jumlah guru honorer jauh lebih banyak daripada guru berstatus pegawai negeri. Setiap guru honorer di sekolah tersebut juga sekaligus merupakan guru kelas. Besaran gaji honorer didasarkan pada dana BOS yang diterima dan besarnya dana BOS tergantung pada jumlah siswa pada sekolah tersebut. SDN Bancamara 2 memang memiliki lebih banyak siswa dibandingkan SDN Bancamara 1 dan SDN Bancamara 3. Namun, jumlah guru honorer di SDN Bancamara 2 juga lebih banyak daripada dua sekolah dasar negeri lainnya. Besarnya jumlah gaji yang diterima guru honorer SDN Bancamara 2 seringkali memunculkan niat untuk berhenti mengajar dan mencari pekerjaan lain. Pendekatan secara kekeluargaan ditempuh kepala sekolah SDN Bancamara 2 agar para guru honorer mengurungkan niatnya.
- d. Membuat piket masuk secara bergantian. Strategi ini pernah ditempuh SDN Bancamara 3 guna mengupayakan tetap ada guru yang hadir ke sekolah. Namun, strategi ini tidak berlangsung lama, karena total jumlah gurunya pun tidak memadai.
- e. Memberlakukan hari kerja sebanyak 50 persen plus satu hari dari jumlah total hari efektif dalam satu bulan. Strategi ini diberlakukan oleh kepala sekolah SDN Bancamara 3 karena strategi yang pernah ditempuh sebelumnya, sebagaimana pada poin (d), tidak berlangsung lama. Misal, pada satu bulan terdapat 26 hari efektif. Maka setiap guru diwajibkan hadir ke sekolah sebanyak 50 persen plus satu hari, yakni 14 hari kerja. Sama halnya dengan poin (d), strategi ini dimaksudkan untuk mengupayakan tetap ada guru yang hadir ke sekolah. Konsekuensi bagi guru yang tidak memenuhi kehadiran 50 persen plus satu hari ini, akan terkena kontribusi sebagaimana termuat pada poin (f).
- f. Menerapkan pengadaan kontribusi bagi guru berstatus pegawai negeri yang berhalangan hadir ke sekolah. Kontribusi sebesar Rp 100.000,- per hari tidak

hadir, dikenakan bagi setiap guru pegawai negeri. Strategi ini pernah diberlakukan di SDN Bancamara 3, walaupun sudah tidak diterapkan lagi karena dirasa kurang efektif.

- g. Memberlakukan kebijakan internal sekolah sehubungan dengan alokasi dana BOS untuk kesejahteraan guru honorer. Tiga sekolah dasar negeri di desa Bancamara pulau Gili Iyang menerapkan hal yang sama terkait hal ini. Alokasi dana BOS yang seyogyanya 15 persen per tiga bulan untuk semua guru honorer di setiap sekolah, dirasa kurang menopang kesejahteraan guru honorer. Maka kebijakan yang diambil oleh masing-masing kepala sekolah dasar negeri tersebut adalah dengan menaikkan alokasi 15 persen menjadi 20 persen per tiga bulannya, atau dua kali lipat setiap bulannya, untuk besaran gaji honorer yang diterima oleh guru.
- h. Membiasakan para guru, baik yang berstatus honorer maupun pegawai negeri, untuk siap mengajar lebih dari satu kelas setiap harinya. Strategi ini ditanamkan oleh masing-masing kepala sekolah dasar negeri di desa Bancamara Gili Iyang sebagai upaya terakhir, apabila strategi pada poin-poin sebelumnya tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Strategi ini sebagai alternatif jika ternyata jumlah guru yang hadir tetap saja tidak sesuai dengan banyaknya tingkatan kelas yang harus diisi.

Berdasarkan sumber problematika pembelajaran yang terjadi di pulau Gili Iyang, strategi yang diterapkan oleh kepala sekolah dikelompokkan menjadi tiga. Strategi untuk problematika yang bersumber dari dinas pendidikan adalah: (a) Merekrut *fresh graduate* menjadi guru honorer; dan (b) Memberlakukan kebijakan internal sekolah sehubungan dengan alokasi dana BOS untuk kesejahteraan guru honorer.

Sementara untuk problematika yang bersumber dari guru, strategi yang diterapkan antara lain: (a) Menjaga baik komunikasi antar guru; (b) Mengupayakan pendekatan secara kekeluargaan; (c) Membuat piket masuk secara bergantian; (d) Memberlakukan hari kerja sebanyak 50 persen plus satu hari dari jumlah total hari efektif dalam satu bulan; dan (e) Menerapkan pengadaan kontribusi bagi guru berstatus pegawai negeri yang berhalangan hadir ke sekolah.

Sedangkan strategi yang diterapkan untuk problematika pembelajaran yang bersumber dari manajemen sekolah, adalah: (a) Memberlakukan kebijakan internal sekolah sehubungan dengan alokasi dana BOS untuk kesejahteraan guru honorer; dan (b) Membiasakan para guru untuk siap mengajar lebih dari satu kelas setiap harinya.

Mengatasi problematika yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, bisa ditempuh melalui berbagai alternatif penyelesaian. Berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adlim (Adlim et al., 2016), didapatkan alternatif penyelesaian sebagai berikut: (1) Menyediakan perahu bermotor khusus dan gratis bagi para guru yang mengajar ke pulau; (2) Mempertegas peraturan atau hukuman bagi para pelanggar disiplin; (3) Mengirimkan tenaga pengajar berstatus kontrak daripada PNS, karena lebih tepat dan lebih efektif dalam hal penertibannya; dan (4) Mengangkat guru kontrak asli pulau menjadi guru berstatus PNS.

Sementara itu, terkait dengan problematika pembelajaran yang terjadi di sekolah dasar negeri di desa Bancamara, mengangkat guru kontrak asli pulau untuk menjadi guru berstatus PNS, bisa dijadikan salah satu pilihan guna mengatasi ketidakhadiran guru di sekolah. Ketidakhadiran tersebut disebabkan karena guru tidak berdomisili di pulau Gili Iyang. Dari wawancara dengan ketiga kepala sekolah dasar negeri di desa Bancamara, ketidakhadiran guru di sekolah berdampak pada tidak terpenuhinya jam mengajar di kelas. Sebagaimana hasil penelitian yang pernah dilaporkan oleh Campbell dan Yates (Campbell & Yates, 2011), salah satu keunikan guru di daerah adalah sikap metrosentrik. Sikap metrosentrik adalah selalu berorientasi hidup di perkotaan dan menolak tinggal di pedesaan (Campbell & Yates, 2011). Begitu juga yang terjadi dengan guru pengajar di desa Bancamara pulau Gili Iyang. Guru tersebut bukan penduduk asli pulau, dan memiliki suami atau istri yang bekerja dan menetap di daratan. Rendahnya minat guru mengajar di daerah, selain karena faktor sikap metrosentrik yang ditunjukkan, juga disebabkan oleh minimnya akses transportasi (Vito & Krisnani, 2017). Dengan demikian, mengangkat guru asli pulau menjadi PNS, bisa meminimalkan ketidakhadiran guru di kelas karena faktor domisili dan transportasi air di pulau Gili Iyang.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan:

- a. Problematika pembelajaran di sekolah dasar negeri yang terdapat di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep disebabkan oleh empat faktor, yakni faktor dari Dinas Pendidikan, manajemen sekolah, guru, dan juga lingkungan.
 - (1) Dinas Pendidikan: Distribusi guru di pulau Gili Iyang masih kurang, lebih banyak guru berstatus honorer daripada guru pegawai negeri dalam satu sekolah, total jumlah sekolah dasar negeri dan swasta terlalu banyak, jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah dasar negeri setiap tahunnya, dan dicabutnya tunjangan kepulauan bagi guru honorer.
 - (2) Guru: Ketidakhadiran guru yang tidak berdomisili di pulau Gili Iyang, beberapa bagian dalam RPP terlewat pelaksanaannya, dan guru tidak hadir ke sekolah karena kerap berdagang ke luar provinsi.
 - (3) Manajemen sekolah: Ketidakhadiran guru yang tidak berdomisili di pulau Gili Iyang, guru mengajar lebih dari satu kelas, beberapa bagian dalam RPP terlewat pelaksanaannya, jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah dasar negeri setiap tahunnya, dan alokasi dana BOS untuk kesejahteraan guru honorer.
 - (4) Lingkungan: Belum memadainya jam operasional transportasi air yang tersedia.
- b. Strategi yang diimplementasikan guna mengatasi problematika pembelajaran yang terjadi di sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep, antara lain:
 - (1) Strategi untuk problematika yang bersumber dari dinas pendidikan: Merekrut *fresh graduate* menjadi guru honorer, dan memberlakukan kebijakan internal sekolah sehubungan dengan alokasi dana BOS untuk kesejahteraan guru honorer.
 - (2) Strategi untuk problematika yang bersumber dari guru: Menjaga baik komunikasi antar guru, mengupayakan pendekatan secara kekeluargaan,

membuat piket masuk secara bergantian, memberlakukan hari kerja sebanyak 50 persen plus satu hari dari jumlah total hari efektif dalam satu bulan, dan menerapkan pengadaan kontribusi bagi guru berstatus pegawai negeri yang berhalangan hadir ke sekolah.

- (3) Strategi untuk problematika yang bersumber dari manajemen sekolah: Memberlakukan kebijakan internal sekolah sehubungan dengan alokasi dana BOS untuk kesejahteraan guru honorer, dan membiasakan para guru untuk siap mengajar lebih dari satu kelas setiap harinya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan beberapa saran untuk Dinas Pendidikan, manajemen sekolah, dan juga guru, sehubungan dengan problematika pembelajaran yang terjadi pada sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep:

- a. Menempatkan guru berstatus pegawai negeri secara merata. Data guru di setiap sekolah sudah diunggah dalam laman Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi kekurangan tenaga guru seyogyanya bisa tergambar jelas. Atau, mengangkat guru honorer yang merupakan penduduk asli pulau Gili Iyang untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dengan demikian, kebutuhan akan guru bisa terpenuhi.
- b. Ketidakhadiran guru di sekolah karena faktor kurang disiplinnya guru bisa diminimalkan dengan mempertegas kembali aturan yang berlaku. Alternatif lainnya bisa dengan mengupayakan penyediaan transportasi air yang jam operasionalnya memungkinkan bagi para guru non-penduduk pulau Gili Iyang bisa berangkat dan kembali ke rumah dalam waktu tempuh di hari yang bersamaan.

6. RUJUKAN

Adlim, Gusti, H., & Zulfadli. (2016). Pendidikan di daerah kepulauan (Studi kasus di SMA Negeri 1 Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Pencerahan*.

- Adlim, Soewarno, Khairil, S., Usman dan Hasbi. (2011). *Pemetaan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Simeulue*. Laporan Penelitian PPMP, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Adlim, M., S, S., Ali, H., Ibrahim, A., Umar, H., Ismail, K., ... Yasin, B. (2014). ASSESSING CHEMISTRY-LEARNING COMPETENCIES OF STUDENTS IN ISOLATED RURAL SENIOR HIGH SCHOOLS BY USING THE NATIONAL EXAMINATION: A CASE STUDY OF SIMEULUE ISLAND, INDONESIA. *International Journal of Science and Mathematics Education*. <https://doi.org/10.1007/s10763-013-9440-x>
- Ali Muhson. (2004). Meningkatkan Profesionalisme Guru: Sebuah Harapan. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*.
- Azis, A. (2014). Kompetensi Guru Dalam Penggunaan Media Dengan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pelopor Pendidikan*.
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemkab Sumenep TA 2018*. Pemerintah Kabupaten Sumenep. Diakses tanggal 9 Januari 2019 dari <http://www.bkpsdm.sumenepkab.go.id/website/berita-251-penerimaan-cpns-di-lingkungan-pemkab-sumenep-ta-2018.html>
- Budyartati, Sri. (2016). *Problematika Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Magetan : CV. AE Media Grafika.
- Campbell, A. M., & Yates, G. C. R. (2011). Want to be a country teacher? No, I am too metrocentric. *Journal of Research in Rural Education*.
- Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. *Giliyang*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan : Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Diakses tanggal 10 Oktober 2018 dari http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/4674
- Djalil, Aria. (1998). *Pembelajaran Kelas Rangkap, Modul PGSD*. Jakarta : Depdiknas.
- Hanafy, S. M. (2014). Konsep Belajar dan Pembelajaran. *Lentera Pendidikan*.

[https://doi.org/10.1016/0020-7403\(87\)90047-6](https://doi.org/10.1016/0020-7403(87)90047-6)

Hasanah, Aan. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung : Pustaka Setia.

Kurniawan, A. (2016). SEJARAH PENDIDIKAN MASYARAKAT PESISIR NUSANTARA. *TAMADDUN*.

Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Maritime Economy*.
<https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.11.209>

Lyson, T. A., Flora, C. B., Flora, J. L., Spears, J. D., Swanson, L. E., Lapping, M. B., & Weinberg, M. L. (2006). Rural Communities: Legacy and Change. *Contemporary Sociology*. <https://doi.org/10.2307/2074627>

Moleong, Lexy. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Mulkeen, A., & Chen, D. (2008). Teachers for Rural Schools. Experiences in Lesotho, Malawi, Mozambique, Tanzania, and Uganda. In *Teacher*.

Mulyasa, E. (2013). Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. In *Remaja Rosdakarya*. <https://doi.org/10.1063/1.3677665>

Pemkab Sumenep. *Letak Geografis Kabupaten Sumenep*. Sumenep : Pemerintah Kabupaten Sumenep. Diakses tanggal 2 Maret 2018 dari <http://www.sumenepkab.go.id/page/letak-geografis>

Pemkab Sumenep. Gili Iyang, Tips dan Akses Menuju Pulau Gili Iyang. Sumenep : Pemerintah Kabupaten Sumenep. Diakses tanggal 2 Maret 2018 dari <http://www.sumenepkab.go.id/wisata/baca/Alam/gili-iyang>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Shabir, M. (2015). Kedudukan Guru Sebagai Pendidik : Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, dan Kompetensi Guru. *Auladunia*.

Sudarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Pemenuhan Beban Kerja Guru SMA Negeri di Tarakan*, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 3 Nomor 1 Januari 2015: 111-116 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,*

- dan R&D. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Sutarmanto. (2015). KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME GURU. *Jurnal Tabularasa*.
- Tilaar, H.A.R. (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Ulfatin, Nurul. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan : Teori dan Aplikasinya*. Malang : Media Nusa Creative.
- UU No 14 Tahun 2005, R. (2005). Undang-undang Guru dan Dosen. *Produk Hukum*. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0167-2991\(08\)63816-1](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0167-2991(08)63816-1)
- Vito, B., & Krisnani, H. (2017). KESENJANGAN PENDIDIKAN DESA DAN KOTA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13533>
- Widoyoko Tayibnapi, F. Y. (2000). Evaluasi Program Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Yesse, Michael. (2011). *Distribusi Kebutuhan Dan Ketercukupan Guru Bidang Studi Tingkat SMP Negeri Kabupaten Sleman Tahun 2010*. Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.